

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1	Perangkat Daerah	:	BKPSDM
2	Nama Inovasi	:	Aplikasi Sistem Usulan Pensiun (Suspensi)
3	Tahapan Inovasi	:	Inisiatif/Uji coba /Penerapan*
4	Bentuk Inovasi	:	Inovasi Pelayanan Kepegawaian
5	Jenis Inovasi	:	Inovasi Digital / non digital *
6	Rancang bangun Inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan	:	Rancang bangun minimal 300 kata yang memuat : Dasar Hukum : • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). • Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian PNS. • Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Permasalahan (Makro/Mikro): Dalam era digitalisasi tata kelola pemerintahan, proses pengusulan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami transformasi signifikan dengan dilaksanakannya pengusulan secara digital. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efisiensi dan integrasi proses tersebut secara menyeluruh. Salah satu permasalahan utama adalah banyaknya dokumen fisik yang tetap harus diunggah secara manual oleh pengusul, yang menyebabkan proses menjadi tidak sepenuhnya paperless dan menyulitkan dalam aspek verifikasi serta pengarsipan. Selain itu, dua dokumen penting yang menjadi syarat kelengkapan usulan, yaitu Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari Inspektorat dan Surat Keterangan Bebas Aset dari BPKPAD, masih harus diurus secara terpisah dan manual oleh masing-masing ASN atau

		pengelola kepegawaian perangkat daerah. Hal ini menimbulkan duplikasi proses, keterlambatan, dan tidak sinkronnya data antarinstansi. Menjawab permasalahan tersebut, Aplikasi SUSPensi (Sistem Usulan Pensiun Terintegrasi) diluncurkan sebagai inovasi baru yang menghadirkan solusi digital secara end-to-end. SUSPensi tidak hanya menjadi wadah utama untuk pengusulan pensiun secara elektronik, tetapi juga mengintegrasikan proses pengelolaan dokumen pendukung lintas instansi secara daring. Melalui aplikasi ini, pengusulan surat bebas disiplin secara otomatis terkoneksi dengan Inspektorat, dan permintaan surat bebas aset dapat langsung dikoordinir kepada BPKPAD tanpa harus dilakukan secara manual oleh perangkat daerah. Dengan hadirnya aplikasi SUSPensi, proses usulan pensiun menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Koordinasi antarinstansi berjalan lebih efisien, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, dan ASN yang akan pensiun tidak lagi dibebani proses administratif yang panjang dan berulang. Inovasi ini merupakan langkah konkret menuju pelayanan kepegawaian yang digital, transparan, dan berbasis data, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Isu Strategis : • Belum Terintegrasinya Layanan Antar instansi dalam Proses Pengusulan Pensiun. Meskipun pengusulan pensiun telah dilakukan secara digital, proses pengumpulan dokumen pendukung seperti surat bebas disiplin dan surat bebas aset masih dilakukan secara manual dan terpisah antarinstansi, sehingga menghambat efisiensi dan ketepatan waktu pelayanan. • Beban Administratif yang Tinggi bagi ASN dan Pengelola Kepegawaian. ASN yang akan pensiun maupun pengelola kepegawaian di perangkat daerah masih harus mengurus beberapa dokumen secara manual ke Inspektorat dan BPKPAD, yang menambah beban kerja serta berpotensi menimbulkan keterlambatan.
--	--	---

		• Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Layanan Kepegawaian. Sistem digital yang ada belum sepenuhnya paperless dan belum mengakomodir koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga digitalisasi yang dilakukan belum berdampak optimal terhadap kecepatan dan kualitas layanan. • Kurangnya Kepastian dan Transparansi dalam Proses Verifikasi Dokumen Pensiun. Ketergantungan pada proses manual dan tidak terhubungnya sistem antarlembaga menyebabkan kurangnya transparansi dan kesulitan dalam memantau progres pengusulan secara real-time. • Kebutuhan akan Sistem yang Terpadu dan Kolaboratif dalam Layanan Kepegawaian. Diperlukan inovasi sistem informasi yang mampu menyatukan proses pengusulan, verifikasi, dan penerbitan dokumen pendukung dalam satu platform agar pelayanan pensiun ASN menjadi lebih efisien, terukur, dan terstandar. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah) A. SEBELUM PEMBAHARUAN (Kondisi Eksisting) • Pengusulan dilakukan secara digital namun belum terintegrasi: ○ Pengusulan pensiun sudah melalui aplikasi esimpeg, namun hanya sebatas pengiriman dokumen dasar (SK, daftar riwayat hidup, SK Riwayat kerja, SP4A, SKKPS dll). ○ Proses masih membutuhkan unggahan banyak dokumen manual. • Pengurusan dokumen pendukung dilakukan secara manual dan terpisah: ○ Surat Keterangan Bebas Disiplin harus diajukan ke Inspektorat secara langsung melalui surat atau kunjungan fisik. ○ Surat Bebas Aset diajukan ke BPKPAD melalui proses surat-menyurat manual. • Koordinasi antarinstansi belum efektif: ○ Tidak ada sistem yang memfasilitasi pengiriman atau pengecekan dokumen antar perangkat daerah secara online.
--	--	--

		- o Waktu penyelesaian dokumen sulit diprediksi dan tidak bisa dipantau secara real-time. Keunggulan dan kebaharuan Sesudah Pembaharuan (Setelah Inovasi Aplikasi SUSPENSI) • Peluncuran aplikasi SUSPENSI sebagai platform terintegrasi: - o Menyatukan seluruh tahapan pengusulan pensiun, termasuk permintaan dan penerbitan dokumen pendukung. - o ASN atau pengelola kepegawaian hanya menginput data dan dokumen utama satu kali. • Koordinasi otomatis dengan Inspektorat dan BPKPAD: - o Permintaan surat bebas disiplin dan surat bebas aset dikirimkan otomatis melalui sistem ke masing-masing instansi. - o Status dan progres pengurusan dapat dimonitor langsung dalam aplikasi. • Pengurangan unggahan dokumen berulang dan manual: - o Dokumen yang sudah tersedia dalam basis data kepegawaian tidak perlu diunggah ulang. - o Sistem menarik data dan dokumen dari database kepegawaian yang telah terintegrasi (misalnya SAPK atau SIMPEG lokal). • Peningkatan efisiensi dan transparansi layanan: - o Proses usulan menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. - o Pimpinan dapat melakukan monitoring terhadap kinerja pelayanan dan progres pengusulan pensiun secara real-time. Tahapan Inovasi/penggunaan produk/ spesifikasi produk
--	--	---

		1. Tahapan Inovasi a. Identifikasi Permasalahan • Ditemukan bahwa pengusulan pensiun ASN belum sepenuhnya efisien meskipun telah digital. • Proses pengurusan dokumen pendukung (bebas disiplin dan bebas aset) masih manual dan memakan waktu. b. Perancangan Solusi • Dilakukan pemetaan alur proses usulan pensiun secara end-to-end. • Disusun rancangan aplikasi berbasis web untuk mengintegrasikan tahapan pengusulan dengan proses verifikasi lintas instansi. c. Pengembangan Aplikasi • Dibuat prototipe aplikasi SUSPENSI dengan fitur utama: entry data usulan pensiun, upload dokumen, pengiriman permintaan otomatis ke Inspektorat dan BPKPAD, serta monitoring status. d. Uji Coba dan Evaluasi • Uji coba dilakukan pada beberapa perangkat daerah dengan ASN yang akan pensiun dalam waktu dekat. • Evaluasi melibatkan feedback dari pengguna (pengelola kepegawaian) dan instansi terkait. e. Implementasi dan Penguatan Regulasi • Aplikasi mulai diterapkan secara resmi dalam proses pengusulan pensiun pada tanggal 26 Mei 2025. • Disusun petunjuk teknis penggunaan dan dilakukan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah melalui daring dan luring pada tanggal 26 Mei 2025. 2. Penggunaan Produk (Alur Penggunaan Aplikasi Suspensi)
--	--	---

- **Login oleh Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Masuk melalui <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id> menggunakan user dan password esimpeg
- **Input Data ASN yang Akan Pensiun**
 - Cek data jabatan
- **Unggah Dokumen Dasar**
 - Seperti SK CPNS, SK terakhir, dan (daftar riwayat hidup).
- **Permintaan Otomatis Dokumen Pendukung**
 - Sistem secara otomatis mengirimkan permintaan ke:
 - **Inspektorat** untuk surat bebas hukuman disiplin.
 - **BPKPAD** untuk surat bebas aset.
- **Pemrosesan oleh Instansi Terkait**
 - Inspektorat dan BPKPAD menerima notifikasi dan memproses melalui dashboard internal.
 - Setelah selesai, dokumen diunggah langsung oleh instansi ke sistem.
- **Verifikasi oleh BKPSDM**
 - BKPSDM melakukan pengecekan akhir sebelum menerbitkan usulan resmi ke BKN.
- **Monitoring dan Notifikasi**
 - Status usulan dapat dipantau real-time oleh semua pihak yang terlibat.

Spesifikasi Produk

Komponen	Deskripsi
Nama Aplikasi	SUSPENSI (Sistem Usulan Pensiun Terintegrasi)
Platform	Berbasis Web (desktop & mobile responsive)
Teknologi	PHP/Laravel, MySQL, REST API, Javascript
Fitur Utama	Entry data pensiun, upload dokumen, pengiriman otomatis ke instansi

			Integrasi Layanan Inspektorat (bebas disiplin) dan BPKPAD (bebas aset) Dashboard Pemantauan Monitoring status oleh perangkat daerah, BKPSDM, Inspektorat, BPKPAD Keamanan Data Multi-level login, enkripsi dokumen, audit trail Output Berkas usulan lengkap siap dikirim ke BKN, dengan dokumen terverifikasi User Pengelola kepegawaian OPD, Inspektorat, BPKPAD, BKPSDM.
7	Tujuan Inovasi	:	Target Capaian Penyelenggaraan Inovasi adalah : Target Capaian Penyelenggaraan Inovasi: 1. Terwujudnya Proses Usulan Pensiun ASN yang Terintegrasi dan Efisien • Mengurangi tahapan manual dalam pengurusan dokumen pensiun ASN. • Menyatukan alur pengusulan pensiun dengan permintaan dokumen pendukung lintas instansi ke dalam satu sistem digital. 2. Pengurangan Waktu Layanan Usulan Pensiun • Mempercepat waktu penyelesaian usulan pensiun hingga 30–50% dibandingkan menggunakan aplikasi sebelumnya. • Meminimalisasi keterlambatan karena kendala administratif lintas instansi. 3. Peningkatan Kualitas Layanan Kepegawaian • Menyediakan layanan yang responsif, transparan, dan dapat dimonitor oleh semua pihak terkait. • Memberikan kepastian kepada ASN terkait status pengusulan pensiun mereka. 4. Pengurangan Beban Administratif Perangkat Daerah • Mengurangi jumlah dokumen yang perlu diunggah secara manual.

			• Menghindari duplikasi pengurusan dokumen oleh pengelola kepegawaian OPD. 5. Terintegrasinya Sistem Pelayanan dengan Inspektorat dan BPKPAD • Minimal 80% usulan pensiun dapat dilakukan tanpa tatap muka atau surat-menyerat manual dengan instansi pendukung. 6. Tersedianya Data dan Jejak Digital yang Terpusat • Seluruh dokumen dan riwayat pengusulan terdokumentasi dalam sistem. • Memudahkan audit, pelaporan, dan pengambilan kebijakan kepegawaian berbasis data. 7. Terimplementasinya SUSPENSI di Seluruh Perangkat Daerah • 100% OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan aplikasi ini dalam proses pengusulan pensiun ASN. Tidak saja untuk pengusulan BUP, tapi APS dan janda duda juga • Meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prosedur yang telah distandardisasi.
8	Manfaat yang di peroleh	:	Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi daerah. Penerapan inovasi SUSPENSI (Sistem Usulan Pensiun Terintegrasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan sejumlah dampak nyata yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya efisiensi proses administrasi, di mana waktu penyelesaian usulan pensiun dapat dipangkas hingga 30–50% dibandingkan dengan metode sebelumnya. Pengurangan tahapan manual dan integrasi lintas instansi membuat beban kerja pengelola kepegawaian menurun signifikan, sehingga waktu dan tenaga dapat dialihkan untuk tugas strategis lainnya.

		Inovasi ini juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik. ASN yang akan pensiun kini mendapatkan pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan dapat dipantau secara real-time, meningkatkan kepercayaan serta kepuasan mereka terhadap pelayanan BKPSDM. Di sisi lain, terbangunnya integrasi sistem antara BKPSDM, Inspektorat, dan BPKPAD menunjukkan terciptanya sinergi antarinstitusi dalam satu platform yang terpadu. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghindari duplikasi pekerjaan serta memastikan keakuratan data dan dokumen yang digunakan. Lebih jauh, aplikasi SUSPENSI mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mendukung digitalisasi proses pengusulan pensiun secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Semua dokumen dan riwayat proses terekam secara digital, sehingga memudahkan pelacakan, audit, serta pengambilan keputusan berbasis data. Jejak digital yang terdokumentasi juga meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Dari sisi kepatuhan, aplikasi ini membantu perangkat daerah dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara standar, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif. Selain itu, BKPSDM sebagai penggagas dan pelaksana inovasi mendapat penguatan citra sebagai institusi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam jangka panjang, inovasi ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi digital yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan saat ini, tetapi juga membuka peluang replikasi untuk jenis layanan kepegawaian lainnya, seperti mutasi, kenaikan pangkat, hingga pengangkatan ASN baru. Dengan terimplementasinya SUSPENSI di seluruh perangkat daerah dan jenis pensiun (BUP, APS, maupun pensiun janda/duda), inovasi ini telah menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang lebih efisien,
--	--	--

			terukur, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
9	Hasil Inovasi	:	Produk/Hasil (output) penyelenggaraan inovasi daerah. Penerapan inovasi aplikasi SUSPENSI telah menghasilkan sejumlah capaian konkret dalam meningkatkan mutu layanan kepegawaian, khususnya dalam proses pengusulan pensiun ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pertama yang paling menonjol adalah terciptanya sistem layanan pensiun yang terintegrasi, efisien, dan digital end-to-end. Melalui aplikasi ini, seluruh tahapan mulai dari penginputan data, pengunggahan dokumen, hingga permintaan surat keterangan bebas disiplin dan bebas aset kini dapat dilakukan dalam satu platform tanpa perlu proses manual dan tatap muka lintas instansi. Aplikasi ini juga berhasil mempercepat waktu penyelesaian pengusulan pensiun hingga 30–50%, karena tidak lagi terhambat oleh proses pengurusan dokumen fisik dan surat-menyurat antar instansi. Dokumen pendukung yang sebelumnya harus diminta secara terpisah oleh masing-masing ASN kini dapat langsung dikoordinasikan secara otomatis oleh sistem kepada Inspektorat dan BPKPAD. Selain mempercepat layanan, hal ini juga mengurangi beban administratif pengelola kepegawaian dan meminimalisasi potensi kesalahan atau keterlambatan. Dari sisi pemantauan, aplikasi SUSPENSI menghadirkan fitur dashboard monitoring real-time yang memungkinkan semua pihak—baik OPD, BKPSDM, Inspektorat, maupun BPKPAD—untuk melihat progres pengusulan pensiun secara transparan dan akurat. Selain itu, keberadaan jejak digital dan dokumentasi elektronik yang terpusat mendukung peningkatan akuntabilitas serta memudahkan proses audit, pelaporan, dan evaluasi kebijakan SDM ASN secara berbasis data. Hasil lainnya yang tak kalah penting adalah peningkatan kepatuhan terhadap standar prosedur layanan. Aplikasi ini memastikan bahwa

			semua perangkat daerah mengikuti tahapan yang telah distandardisasi, sehingga mengurangi ketidaksesuaian dokumen dan meningkatkan kualitas berkas usulan yang diajukan ke BKN. Hingga saat ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan SUSPENSI, tidak hanya untuk pensiun karena batas usia pensiun (BUP), tetapi juga pensiun atas permintaan sendiri (APS) dan pensiun janda/duda. Secara keseluruhan, hasil inovasi ini menunjukkan bahwa aplikasi SUSPENSI bukan hanya sebuah alat bantu teknis, tetapi telah menjadi motor penggerak transformasi digital layanan kepegawaian, yang mendukung terwujudnya birokrasi yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan ASN serta sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan SPBE.
10	Waktu uji coba inovasi	:	Ujicoba dilakukan pada bulan April 2025
11	Waktu Implementasi inovasi	:	Implementasi dilakukan pada Bulan Mei tahun 2025
12	Anggaran	:	Nihil

*coret yang tidak perlu

Painan, 26 Mei 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Yozki Wandri, S.Pi., M.Si
NIP. 19750101 200003 1 001